

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai media pelaporan, laporan keuangan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi finansial perusahaan dalam jangka waktu tertentu. IAI (2025) menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan memberikan informasi penting yang relevan terkait posisi keuangan, kinerja operasional, serta arus kas suatu perusahaan. Data tersebut sangat berguna bagi pihak yang menggunakan laporan keuangan saat melakukan penentuan keputusan terkait kegiatan ekonomi. Akan tetapi, dalam praktiknya laporan keuangan seringkali menyajikan data atau informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal tersebut menegaskan bahwa kualitas dan keandalan laporan keuangan sangat bergantung pada integritas manajemen dalam menyajikan informasi yang sesuai dengan kenyataan (Khuluqi & Napisah, 2022).

Tindakan manipulasi pada laporan keuangan merujuk pada upaya yang disengaja oleh pihak internal perusahaan, baik individu maupun manajemen untuk menampilkan kondisi keuangan perusahaan seolah – olah lebih baik dari keadaan sebenarnya (ACFE, 2022). Tindakan ini berbahaya karena dapat merusak kepercayaan investor, kreditor, regulator, dan masyarakat terhadap integritas pasar modal. Ketika informasi dalam laporan keuangan dimanipulasi, tindakan tersebut tergolong sebagai *fraud*. Bentuk kecurangan semacam ini dikenal dengan istilah *fraudulent financial reporting*. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa laporan

keuangan tidak hanya berperan sebagai sumber informasi, melainkan dapat pula dijadikan sebagai media manipulasi apabila tidak diawasi dengan baik (Khuluqi & Napisah, 2022).

Sampai saat ini, fenomena praktik manipulasi laporan keuangan masih ditemukan pada sejumlah perusahaan di berbagai negara dan menjadi salah satu isu serius dalam tata kelola perusahaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kecurangan laporan keuangan bukan sekadar masalah akuntansi, melainkan persoalan tata kelola yang mendesak untuk diteliti lebih jauh agar dapat ditemukan upaya pencegahan yang efektif. Di Indonesia, fenomena serupa juga terjadi di berbagai sektor industri, termasuk sektor *basic materials* yang memiliki peran strategis dalam perekonomian negara. Dalam klasifikasi Bursa Efek Indonesia (BEI), sektor *basic materials* mencakup perusahaan yang berfokus pada industri pertambangan (minyak, gas, logam, dan batu bara), industri kimia, industri material bangunan, dan industri terkait lainnya.

Salah satu kasus terjadi pada PT Bumi Resources Minerals Tbk yang bermula dari kecurigaan Bapepam – LK terhadap adanya penyimpangan dalam laporan keuangan perusahaan dan anak usahanya. Penelitian mengungkap bahwa perusahaan diduga melakukan *cash flow shenanigans* (rekayasa arus kas) melalui dua praktik utama. Pertama, perubahan signifikan pada angka belanja modal yang berpotensi menutupi kondisi arus kas sebenarnya. Kedua, penundaan pelunasan kewajiban dengan sengaja untuk menampilkan arus kas operasional yang tampak lebih tinggi. Kondisi ini diperkuat oleh penurunan arus kas operasional dari tahun 2019 hingga 2022 serta peningkatan kembali pada 2023 yang tidak mencerminkan

perbaiki fundamental, melainkan hasil dari manipulasi pelaporan keuangan. (Christian *et al.*, 2024).

Selain itu, ditemukan bahwa PT Bumi Resources sengaja menunda pembayaran utang usaha, terutama kepada pihak – pihak berelasi, guna mempertahankan arus kas operasional positif. Praktik ini tergolong dalam *Cash Flow Shenanigans* No. 3, yaitu peningkatan arus kas operasi melalui aktivitas yang tidak berkelanjutan. Perusahaan juga diduga mengalihkan arus kas dari aktivitas operasi ke kategori investasi atau pendanaan, menciptakan kesan seolah – olah terjadi efisiensi kas. Secara keseluruhan, tindakan – tindakan ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menyesatkan pemangku kepentingan dengan memperlihatkan posisi keuangan yang lebih baik dari kondisi riil perusahaan, sehingga menimbulkan risiko bagi investor dan kreditor dalam menilai kinerja finansial (Christian *et al.*, 2024).

Selanjutnya, yaitu pada PT Timah Tbk yang diduga melakukan praktik *fraud* secara berkelanjutan sejak tahun 2015 hingga 2022. Modus yang digunakan meliputi pemalsuan dokumen keuangan dan pencatatan transaksi fiktif yang menggambarkan adanya rekayasa terstruktur untuk menutupi kerugian operasional perusahaan. Selanjutnya, penggelembungan nilai pembelian barang dan jasa (*overstatement*) juga memperlihatkan bagaimana manajemen perusahaan berusaha memperindah kondisi laporan keuangan agar terlihat lebih sehat. Pada laporan keuangan semester I tahun 2015, kerugian operasional perusahaan seharusnya mencapai Rp 59 miliar, namun dalam laporan resmi yang dipublikasikan hanya dilaporkan sebesar Rp 19 miliar (Mahendra *et al.*, 2024).

Pada 14 Oktober 2024, PT Timah diketahui melakukan aktivitas penambangan di area yang tidak termasuk dalam area izin usaha pertambangan (IUP) resmi dan menjual hasilnya melalui mekanisme yang tidak tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian manipulasi tidak hanya terjadi dalam aspek pelaporan, tetapi juga dalam praktik operasional dan perusahaan secara langsung menyembunyikan pendapatan yang seharusnya tercatat dan diaudit. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menemukan bahwa PT Timah melakukan manipulasi data produksi dan biaya yang menyebabkan harga pokok penjualan (HPP) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga menimbulkan kerugian negara hingga Rp 271 triliun (Ni'am & Ramadhan, 2024).

Selain itu, kasus pada PT Krakatau Steel Tbk menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan tidak selalu berbentuk manipulasi angka secara eksplisit, tetapi dapat muncul melalui praktik ketidakpatuhan dalam penyajian informasi. Perusahaan ini pernah mendapat sorotan karena menunjukkan lemahnya kepatuhan perusahaan terhadap standar pelaporan yang diberlakukan oleh BEI dan OJK dengan keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan serta menggunakan laporan keuangan sementara yang belum diaudit sebagai perbandingan dalam laporan resmi. Praktik semacam ini bukan hanya masalah administratif, tetapi dapat menimbulkan asimetri informasi yang dapat berpotensi menyesatkan investor dan para pemangku kepentingan, mengingat laporan yang dijadikan acuan tidak menggambarkan keadaan keuangan perusahaan secara utuh (Priambodo & Hannany, 2025).

Lebih lanjut, PT Krakatau Steel Tbk menghadapi beban utang besar dan tekanan likuiditas yang memicu risiko anomali pencatatan keuangan, misalnya dengan menunda pengakuan beban bunga atau mengklasifikasikan kewajiban jangka pendek sebagai jangka panjang. Dalam restrukturisasi, perusahaan diduga menunda pengakuan beban atau mengubah klasifikasi kewajiban agar terlihat lebih sehat secara finansial, namun sebenarnya praktik semacam ini bisa menyesatkan investor maupun pemegang saham dalam menilai kemampuan perusahaan membayar utang atau menghasilkan arus kas. Meski tidak selalu disebut sebagai “*fraud*” oleh regulator, praktik ini mencerminkan indikasi *fraudulent financial reporting* karena menutupi kondisi riil perusahaan dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas sebagai BUMN strategis (Khairani *et al.*, 2025).

Kemudian, berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat indikasi praktik kolaborasi palsu antara perusahaan – perusahaan afiliasi terkait transaksi pengiriman barang yang tidak sesuai praktik usaha nyata mencapai Rp 42,57 miliar. Temuan tersebut melibatkan PT Semen Indonesia Tbk melalui anak perusahaannya, yaitu PT Semen Padang yang memiliki perusahaan afiliasi bernama PT Bima Sepaja Abadi dengan PT ATL dan CV AL. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal sebagai BUMN strategis dan temuan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Periode 2020 – 2022 (Semester I) yang dilakukan oleh BPK (Suhartono *et al.*, 2023).

Temuan BPK ditunjukkan oleh dokumen surat muat dan surat jalan tanpa pengesahan dari penerima barang, penggunaan kendaraan dengan kapasitas angkut

yang tidak sesuai dengan muatan tercantum, serta ketiadaan klarifikasi dari kedua pihak terkait. Hal ini mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menciptakan “jejak transaksi” yang sebenarnya tidak pernah terjadi, karena tidak ada bukti pelaksanaan usaha yang nyata. Dari sisi keuangan, BPK juga menemukan adanya selisih antara piutang PT ATL, pengeluaran dana PT BSA untuk CV AL, dan penerimaan dari PT ATL yang menimbulkan kekurangan penerimaan serta keuntungan belum terealisasi, sehingga piutang PT ATL dianggap tidak didukung kegiatan usaha yang valid (Suhartono *et al.*, 2023).

Kasus yang lebih kompleks dialami oleh PT Antam Tbk, kasus kecurangan mencuat karena adanya indikasi penyalahgunaan fasilitas pemurnian emas (*stamping*), yaitu pencetakan logam mulia dengan cap resmi Antam yang seharusnya hanya diberikan pada produk hasil produksi internal. Dalam praktiknya, fasilitas tersebut diduga digunakan untuk memberi cap pada emas yang bukan berasal dari Antam sehingga produk ilegal itu memperoleh legitimasi sebagai emas resmi. Selain itu, terdapat pula dugaan aktivitas impor dan ekspor emas dalam jumlah besar yang tidak wajar, serta tidak sepenuhnya tercatat secara transparan dalam laporan resmi perusahaan. Kecurangan tersebut bukan hanya merugikan konsumen yang percaya pada kualitas emas Antam, tetapi juga berpotensi mencoreng reputasi perusahaan sebagai salah satu produsen logam mulia terbesar di Indonesia (Febiola & Sari, 2024).

Modus lain yang disorot adalah dugaan manipulasi kode HS (*Harmonized System*) pada perdagangan internasional. Dengan mengubah kategori produk emas, perusahaan diduga dapat menghindari tarif bea masuk dan pajak ekspor, yang pada

akhirnya menimbulkan potensi kerugian besar bagi penerimaan negara dan menimbulkan ketidakakuratan pada laporan keuangan, terutama pada pos biaya dan kewajiban pajak. Kejaksaan Agung sempat menyelidiki dugaan korupsi dalam ekspor emas oleh Antam pada tahun 2021, meskipun pihak perusahaan membantah tuduhan tersebut. Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut transparansi pelaporan, kepatuhan regulasi, serta integritas laporan keuangan di sektor pertambangan dan logam mulia (Kamala *et al.*, 2025).

Berdasarkan pembahasan fenomena – fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecurangan laporan keuangan di perusahaan di sektor *basic materials* sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan hasil interaksi dari berbagai faktor risiko yang saling memperkuat, termasuk tekanan untuk menampilkan performa finansial yang baik, adanya peluang akibat lemahnya sistem pengendalian internal, pembenaran dari pelaku atas tindakan tersebut, kemampuan dalam melakukan manipulasi data, pengaruh karakteristik pribadi seperti arogansi, kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi, dan sifat serakah. Tindakan ini dapat menimbulkan dampak signifikan seperti kerugian finansial negara, hilangnya kepercayaan pemangku kepentingan, dan gangguan terhadap stabilitas pasar modal dan keberlanjutan operasional perusahaan.

Dengan demikian, pelaksanaan penelitian ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi disebabkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, perusahaan sektor *basic materials* yang tercatat di BEI memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Perusahaan di sektor ini menghasilkan bahan baku utama seperti tambang, logam, semen, dan kimia yang menjadi fondasi bagi berbagai industri lain. Namun,

kenyataan menunjukkan bahwa banyak dari perusahaan ini terlibat dalam kasus *fraud* dengan nilai kerugian negara yang signifikan, sehingga berdampak pada kerugian finansial, reputasi perusahaan, kepercayaan investor dan pemegang saham, serta stabilitas pasar modal. Dengan demikian, mengidentifikasi dan menelaah berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya manipulasi dalam laporan keuangan menjadi hal yang sangat krusial dan mendesak.

Kedua, penelitian ini memiliki urgensi karena sebagian besar penelitian terdahulu hanya menguji sebagian dari elemen *Fraud Heptagon* atau berfokus pada sektor non publik, sehingga belum banyak pemahaman yang utuh dalam konteks perusahaan publik sektor *basic materials*. Hasil – hasil penelitian sebelumnya pun menunjukkan adanya ketidakkonsistenan, di mana beberapa variabel berpengaruh terhadap *fraud* sementara yang lain tidak. Hal ini menandakan perlunya penelitian lebih lanjut yang bersifat kontekstual dan menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menguji ketujuh variabel *Fraud Heptagon* secara bersamaan. Hasil dari penelitian ini bukan hanya mengonfirmasi atau menyanggah hasil penelitian terdahulu, melainkan juga memberikan kontribusi baru yang lebih spesifik dan aplikatif dalam upaya pencegahan dan deteksi *fraud*.

Terakhir, urgensi lain terletak pada manfaat praktis penelitian ini bagi para pemangku kepentingan, seperti manajemen perusahaan, auditor, regulator, dan investor. Melalui hasil penelitian ini, manajemen perusahaan dapat terbantu dalam mengidentifikasi potensi risiko *fraud* sejak dini. Serta dapat memberikan manfaat bagi auditor dalam pengembangan prosedur audit yang berfokus pada risiko *fraud*.

Serta, penelitian ini dapat membantu regulator dalam menyusun kebijakan pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, bagi investor dan pemegang saham, penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap transparansi keuangan perusahaan sektor *basic materials*, yang pada akhirnya mendukung stabilitas pasar modal dan efisiensi pengelolaan dana secara keseluruhan.

Untuk menjawab urgensi tersebut dan memberikan landasan analisis yang komprehensif, diperlukan pendekatan teori yang mampu mencakup berbagai aspek penyebab kecurangan secara lebih luas, yaitu dengan menggunakan teori Agensi dan teori *Fraud Heptagon*. Teori Agensi diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini menggambarkan adanya hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (manajemen perusahaan), di mana agen diberi otoritas untuk menjalankan dan mengelola perusahaan mewakili prinsipal. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat perbedaan kepentingan antara kedua pihak yang memunculkan potensi konflik. Agen cenderung bertindak untuk kepentingan pribadinya dan memanipulasi informasi keuangan guna menunjukkan kinerja yang lebih baik dari kondisi sebenarnya.

Teori agensi relevan digunakan karena dapat menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan sebagai agen dapat memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk melakukan manipulasi laporan keuangan demi mempertahankan citra kinerja, memperoleh bonus, atau menutupi kerugian operasional, meskipun hal tersebut merugikan pemegang saham sebagai prinsipal. Kemudian, Teori *Fraud Heptagon* yang dikembangkan oleh Yusof pada tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari teori – teori sebelumnya dengan menambahkan

variabel ketidaktahuan dan variabel keserakahan. Sehingga *Fraud Heptagon* memiliki tujuh variabel, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, ketidaktahuan, dan keserakahan. Dengan demikian, *Fraud Heptagon Theory* dapat memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk memahami mengapa kecurangan laporan keuangan dapat terjadi.

Faktor tekanan timbul dari dalam individu maupun lingkungan sekitar yang mengarah pada tindakan curang, biasanya berkaitan dengan kebutuhan finansial atau pencapaian target tertentu yang mungkin sulit dicapai dengan cara yang wajar. Tekanan muncul saat target yg ingin dicapai terlalu tinggi, akan tetapi sumber daya yang dimiliki terbatas sehingga pelaku terdorong untuk mengambil jalan pintas, salah satunya dengan melakukan manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan (Tshikovhi *et al.*, 2025). Di perusahaan sektor *basic materials*, tekanan ini seringkali berasal dari investor dan pemegang saham yang mengharapkan perusahaan tetap mencatatkan laba, meskipun kondisi keuangan sebenarnya tidak stabil agar tetap terlihat menguntungkan di mata investor dan pemegang saham.

Sejumlah penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Suhendro (2025), Achmad *et al.* (2025), Trang *et al.* (2025), Tshikovhi *et al.* (2025), Zhang (2025), Pamungkas & Irwandi (2024), Pamungkas *et al.* (2024), Djami & Murtanto (2024), dan Adib *et al.* (2024) mengemukakan bahwa tekanan dapat memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh Fitrianiingsih & Bandi (2024) yang mengemukakan bahwa tekanan tidak terbukti berpengaruh terhadap manipulasi laporan keuangan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan perlunya penelitian

lebih lanjut untuk mengevaluasi bagaimana tekanan memengaruhi manipulasi laporan keuangan pada perusahaan sektor *basic materials*.

Kesempatan adalah situasi di mana lemahnya sistem pengawasan internal memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan manipulatif dengan kemungkinan kecil terungkap. Pada konteks perusahaan di sektor *basic materials*, kesempatan terjadinya manipulasi laporan keuangan cenderung meningkat akibat kompleksitas dan nilai tinggi karakteristik industrinya. Kesempatan sering kali muncul karena kurangnya pengawasan yang memadai, tidak adanya pemisahan tugas yang jelas, atau kurangnya transparansi dalam pelaporan. Ketika celah seperti ini tersedia, pelaku akan merasa lebih mudah melakukan manipulasi laporan keuangan (Zhang, 2025). Maka dari itu, variabel kesempatan termasuk faktor utama yang berpotensi menyebabkan manipulasi laporan keuangan di sektor *basic materials*.

Sejumlah penelitian terdahulu, seperti penelitian oleh Trang *et al.* (2025), Tshikovhi *et al.* (2025), Zhang (2025), (Adib *et al.* (2024) dan Fitriyaningsih & Bandi (2024) menunjukkan bahwa kesempatan dapat memengaruhi kemungkinan terjadinya manipulasi laporan keuangan. Sebaliknya, penelitian oleh Permatasari & Suhendro (2025), Achmad *et al.* (2025), Pamungkas & Irwandi (2024), Pamungkas *et al.* (2024), serta Djami & Murtanto (2024) menunjukkan bahwa kesempatan tidak terbukti berpengaruh. Ketidakkonsistenan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa pengaruh kesempatan terhadap manipulasi laporan keuangan masih belum dapat disimpulkan secara pasti, sehingga diperlukan penelitian ini untuk memberikan hasil penelitian yang lebih kuat.

Rasionalisasi terjadi ketika pelaku mencari alasan – alasan tertentu untuk membenarkan perbuatannya, sehingga ia merasa tindakan curang yang dilakukan tidak salah (Pamungkas & Irwandi, 2024). Misalnya, ketika harga komoditas global seperti nikel, timah, atau batu bara turun drastis, manajemen bisa saja memanipulasi laporan dengan alasan “menjaga kepercayaan pasar” atau “melindungi lapangan kerja ribuan karyawan”. Rasionalisasi ini berbahaya karena memungkinkan individu merasa bahwa kecurangan adalah tindakan yang masih bisa ditoleransi. Akan tetapi, pada kenyataannya pola pikir semacam ini menormalisasi praktik kecurangan, sehingga mendorong tindakan curang berulang dan semakin sulit diungkap.

Meskipun rasionalisasi dipandang sebagai faktor yang mendorong manipulasi laporan keuangan, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan. Penelitian oleh Trang *et al.* (2025), Tshikovhi *et al.* (2025), Zhang (2025), Pamungkas & Irwandi (2024), Pamungkas *et al.* (2024), Fitriarningsih & Bandi (2024), dan Adib *et al.* (2024) menyebutkan bahwa rasionalisasi memiliki pengaruh. Sebaliknya, menurut Permatasari & Suhendro (2025), Achmad *et al.* (2025), serta Djami & Murtanto (2024) rasionalisasi tidak terbukti memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan. Menimbang adanya perbedaan temuan penelitian terdahulu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam memperluas pemahaman mengenai praktik manipulasi pada perusahaan di sektor *basic materials*.

Kemampuan mencerminkan posisi, wewenang, pengetahuan, atau keterampilan teknis yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan secara

sistematis dan menyembunyikannya dari pihak pengawas, karena memiliki akses terhadap sistem, dokumen, dan informasi strategis perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk menyembunyikan kecurangan. Dengan posisi strategis dan pengetahuan teknis yang mendalam, pelaku mampu memanfaatkan celah dalam standar akuntansi maupun prosedur operasional untuk menyamarkan kecurangan, misalnya melalui manipulasi klasifikasi aset, penggelembungan nilai persediaan, atau penundaan pengakuan kewajiban. Pelaku juga mampu membuat transaksi fiktif yang tampak sah serta menggunakan otoritasnya untuk menekan auditor agar tidak mengungkap ketidaksesuaian (Adib *et al.*, 2024).

Penjelasan tersebut semakin menarik untuk diteliti karena pada penelitian terdahulu memberikan temuan yang berbeda. Penelitian oleh Adib *et al.* (2024) mengatakan bahwa kemampuan memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan. Di sisi lain, penelitian oleh Permatasari & Suhendro (2025), Achmad *et al.* (2025), Trang *et al.* (2025), Fitriainingsih & Bandi (2024), Pamungkas & Irwandi (2024), Pamungkas *et al.* (2024), serta Djami & Murtanto (2024) melaporkan bahwa kemampuan tidak memberikan pengaruh. Perbedaan ini menandakan adanya peluang penelitian yang dapat membantu pengelola perusahaan dan regulator dalam mencegah manipulasi laporan keuangan, khususnya perusahaan di sektor *basic materials*.

Arogansi timbul ketika seseorang merasa berada di atas aturan dan hukum karena posisi atau kekuasaan yang dimiliki. Misalnya, manajemen mungkin memaksakan proyek investasi besar tanpa evaluasi risiko yang memadai, menunda atau menghindari pengungkapan informasi keuangan secara transparan, serta

memanfaatkan posisi strategis perusahaan untuk mempengaruhi regulasi atau kebijakan yang seharusnya bersifat netral. Hal ini sangat membahayakan karena dapat menciptakan kultur organisasi yang abai terhadap aturan dan akuntabilitas publik (Permatasari & Suhendro, 2025). Dalam konteks perusahaan sektor *basic materials*, arogansi ini bisa muncul karena perusahaan sering berstatus strategis, memiliki pengaruh besar dalam perekonomian, atau didukung oleh kepemilikan mayoritas tertentu, sehingga manajemen merasa aman dari pengawasan ketat.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa arogansi berkaitan dengan praktik kecurangan dalam laporan keuangan. Misalnya, pada penelitian oleh Permatasari & Suhendro (2025), Pamungkas *et al.* (2024), dan Adib *et al.* (2024) menunjukkan bahwa arogansi berperan dalam terjadinya manipulasi laporan keuangan. Sedangkan, penelitian oleh Achmad *et al.* (2025), Pamungkas & Irwandi (2024), serta Djami & Murtanto (2024) menunjukkan hasil sebaliknya. Variasi dari penelitian – penelitian sebestumnya menegaskan urgensi dilakukannya penelitian tambahan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Sebagian pelanggaran dalam pelaporan keuangan perusahaan sektor *basic materials* juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau pengetahuan atas standar akuntansi, regulasi keuangan negara, atau prinsip tata kelola yang baik. Ketika pelaku tidak mampu membedakan tindakan yang melanggar dan yang tidak, potensi manipulasi informasi keuangan meningkat. Minimnya pelatihan dan edukasi secara berkala juga membuat staf atau manajemen tidak sepenuhnya memahami risiko dan konsekuensi dari tindakan yang tidak sesuai. Selanjutnya,

kondisi ini diperparah jika perusahaan tidak memiliki mekanisme pelaporan dan audit internal yang efektif, sehingga setiap penyimpangan atau penyalahgunaan dana sulit terdeteksi. Oleh karena itu, ketidaktahuan ini menciptakan ruang abu – abu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Djami & Murtanto, 2024).

Namun, berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih ditemukan adanya ketidakselarasan. Penelitian oleh Djami & Murtanto (2024) melaporkan bahwa variabel ketidaktahuan memengaruhi manipulasi laporan keuangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Suhendro (2025), Pamungkas & Irwandi (2024), serta Pamungkas *et al.* (2024) menyimpulkan bahwa ketidaktahuan tidak berpengaruh. Ketidakselarasan tersebut membuka peluang untuk melakukan penelitian ini guna memastikan apakah ketidaktahuan benar – benar berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Keserakahan mencerminkan keinginan yang berlebihan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak wajar, baik dalam bentuk uang, kekuasaan, maupun jabatan Pamungkas *et al.* (2024). Dalam lingkungan perusahaan sektor *basic materials*, keserakahan biasanya muncul saat manajemen atau staf yang sengaja melakukan *mark – up* biaya produksi, merekayasa pendapatan, atau menunda pengakuan kerugian agar target laba, bonus, komisi, atau insentif pribadi bisa diperoleh. Selain itu, pelaku yang terdorong oleh keserakahan sering memanipulasi nilai persediaan, piutang, atau transaksi terkait pihak ketiga, sehingga dapat menimbulkan distorsi laporan keuangan yang menyesatkan pemangku kepentingan.

Meskipun keserakahan dipandang sebagai faktor pemicu terjadinya manipulasi laporan keuangan, hasil dari berbagai penelitian terdahulu menyatakan adanya perbedaan hasil. Seperti penelitian oleh Pamungkas *et al.* (2024) menyebutkan bahwa keserakahan berpengaruh terhadap manipulasi laporan keuangan. Sedangkan, penelitian oleh Permatasari & Suhendro (2025), Pamungkas & Irwandi (2024), serta Djami & Murtanto (2024) melaporkan bahwa keserakahan tidak berpengaruh. Variasi hasil penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya penelitian ini dilaksanakan, khususnya dalam mengevaluasi kembali pengaruh keserakahan pada perusahaan sektor *basic materials* yang rawan terhadap tindakan manipulatif.

1.2 Perumusan Masalah

Berikut dirumuskan pokok permasalahan yang dikaji pada penelitian ini:

1. Apakah tekanan memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan?
2. Apakah kesempatan memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan?
3. Apakah rasionalisasi memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan?
4. Apakah kemampuan memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan?
5. Apakah arogansi memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan?
6. Apakah ketidaktahuan memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan?
7. Apakah keserakahan memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Menguji sejauh mana tekanan memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan.
2. Menguji sejauh mana kesempatan memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan.
3. Menguji sejauh mana rasionalisasi memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan.
4. Menguji sejauh mana kemampuan memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan.
5. Menguji sejauh mana arogansi memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan.
6. Menguji sejauh mana ketidaktahuan memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan.
7. Menguji sejauh mana keserakahan memengaruhi terjadinya manipulasi laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini mampu berkontribusi dalam aspek teoritis, praktis, dan kebijakan. Berikut adalah rinciannya:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman, terutama dalam ranah akuntansi forensik dan tata kelola keuangan.

Dengan mengeksplorasi tujuh variabel utama penyebab kecurangan, penelitian ini dapat memperdalam wawasan akademik mengenai penyebab terjadinya manipulasi laporan keuangan di perusahaan sektor *basic materials*. Di samping itu, penelitian ini turut memberikan landasan bagi penelitian lanjutan yang ingin menganalisis *fraud* secara lebih luas dan komprehensif.

1.4.2. Manfaat Praktis

a.) Bagi Manajemen Perusahaan

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan bagi pihak manajemen dalam mengenali serta mengelola risiko kecurangan sejak tahap awal. Informasi dari hasil penelitian dapat dijadikan pijakan dalam memperkuat mekanisme pengendalian internal serta menumbuhkan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas dan transparansi.

b.) Bagi Investor dan Pemegang Saham

Hasil kajian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan yang membantu pemegang saham dalam menilai kualitas dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, keputusan investasi dapat dilakukan dengan pertimbangan yang lebih objektif dan akurat.

c.) Bagi Auditor dan Pengawas Keuangan

Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit yang lebih mendalam, dengan mempertimbangkan tujuh variabel penyebab *fraud*. Hal ini memungkinkan auditor mengidentifikasi indikasi kecurangan yang mungkin tidak tampak secara kasat mata atau tersembunyi dalam praktik akuntansi.

1.4.3. Manfaat Kebijakan

Kajian ini diupayakan mampu menyediakan informasi yang relevan bagi regulator dalam menyusun strategi dan regulasi pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan. Temuan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan terhadap perusahaan guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Penyusunan sistematika penulisan dimaksudkan agar pembaca lebih mudah mengikuti alur pembahasan. Sehubungan dengan itu, susunan penulisan dalam kajian ini dirancang sebagaimana berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menyajikan uraian mengenai alasan utama dilaksanakannya penelitian, bagaimana perumusan masalah dirancang, tujuan yang ingin dicapai, manfaat hasil penelitian, serta susunan penulisan laporan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat rangkuman penelitian – penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, teori – teori dasar yang digunakan, keterkaitan antarvariabel yang diteliti, penyusunan kerangka berpikir, dan perumusan hipotesis yang akan diuji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memaparkan secara rinci mengenai rancangan penelitian yang diterapkan, ruang lingkup penelitian, penentuan variabel, definisi

populasi dan pemilihan sampel, metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, proses pengolahan data, serta pendekatan analisis yang diterapkan untuk menguji data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bagian pemaparan profil subyek penelitian dan analisis data yang menyajikan gambaran komprehensif mengenai karakteristik subjek yang diteliti, serta menjelaskan secara sistematis tahapan analisis data dan pembahasan terhadap temuan yang dihasilkan dari proses analisis tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bagian akhir ini menguraikan ikhtisar hasil penelitian, memaparkan keterbatasan yang ditemukan selama pelaksanaan penelitian, serta menyajikan rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilaksanakan.